

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk berubah kearah kondisi yang lebih baik melalui berbagai upaya yang dilakukan secara terstruktur. Proses perencanaan tersebut merupakan *critical point* untuk menciptakan keberhasilan pembangunan sehingga harus dilakukan dengan baik dan komprehensif (www.kemendagri.go.id/article/2013/06/12/menju-pusat-data-pembangunan-daerah).

Untuk memperlancar proses pembangunan, maka Indonesia sangat membutuhkan ketersediaan dana yang cukup besar. Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain dapat berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengarahkan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di bidang perekonomian, administrasi dan fiskal. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Akibatnya mekanisme pembiayaan

pelaksanaan otonomi daerah berubah yaitu diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD.

Menurut Utami (2014:1), dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap sangat penting.

Beberapa daerah yang kaya sumber daya alam dapat menggunakan dana bagi hasil. Dana bagi hasil dapat digunakan untuk membiayai biaya belanja pembangunannya, sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki sumber daya alam, belanja pembangunannya masih akan tergantung pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pada tahun anggaran tertentu oleh daerah miskin tersebut. (<http://gugungunawan-goblogyourinfo.blogspot.com/2011/04/pembangunan-daerah.html>). Namun dalam pelaksanaannya sebagian besar dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah, sedangkan bagian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja pembangunan relatif kecil sekali jumlahnya, sehingga diperlukan alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Alternatif sumber pembiayaan pembangunan tersebut dapat diperoleh dari pungutan pajak. Pajak dipungut dari warga

negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Tujuan pemungutan pajak menurut Rahman (2010:11) adalah untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Pajak berpengaruh pada peningkatan jumlah penerimaan pada Dinas Pendapatan yang berfungsi sebagai pemerata pendapatan dan digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal. Pajak juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang pendapatannya rendah. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan pasar (Ahmad Latif, dkk. Peranan Pajak Terhadap pembangunan Daerah).

Jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 3.125.576 jiwa (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2014). Sedangkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya tahun 2009 mencapai 3.753.366, dimana pada tahun 2012 terdapat 108.534 kendaraan

bermotor yang wajib uji. (UPTD PKB DISHUB Surabaya”Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya”).

Semua jenis kendaraan, baik mobil bus, mobil gerobak, mobil gandeng dan mobil temple jumlahnya cenderung naik dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Untuk jumlah kendaraan bermotor umum yang telah diuji pertama kali menurut jenisnya di tahun 2012 secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun 2011 yang hanya 2.309 menjadi 3.736. Tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor umum yang telah diuji ulang juga sama meningkatnya dalam dua tahun yang lalu. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di provinsi Jawa Timur akan mendorong terlaksananya pembangunan karena pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan jumlah penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. (Informasi Data Pokok Kota Surabaya Tahun 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya dan Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat mengungkapkan peranan Pajak Kendaraan Bermotor di kota Surabaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2013-2014. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti memilih judul “Peranan Strategi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur ?

2. Bagaimana pembayaran dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur pada tahun 2013-2014 ?
3. Bagaimana sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang jatuh tempo di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur ?
4. Bagaimana jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan data obyek kendaraan bermotor Tahun 2013-2014 di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur?
5. Bagaimana peranan strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur
2. Untuk mengetahui pembayaran dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur pada tahun 2013-2014

3. Untuk mengetahui sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang jatuh tempo di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur
4. Untuk mengetahui Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan data obyek kendaraan bermotor Tahun 2013-2014 di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur.
5. Untuk mengetahui peranan strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Manajemen Kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan atau sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai di kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur, dapat menyelaraskan atau mencocokkan antara kegiatan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan baik terkait dengan cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta perhitungannya, dan untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disetorkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun 2010-2014, sehingga menjadi

motivasi bagi kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media bagi masyarakat supaya dapat mengetahui seberapa besar penerimaan atas pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2010-2014, masyarakat dapat mengetahui manfaat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemerataan pembangunan, dan sebagai motivasi bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi Universitas Muhammadiyah Surabaya, sebagai bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya, dan sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan keadaan riil dunia kerja.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pencatatan penerimaan kas di kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur dan dapat menganalisa sejauh mana kesesuaian penyusunan neraca saldo Provinsi Jawa Timur, dan sebagai bahan pembanding bagi penelitian yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sehingga peneliti selanjutnya dapat memperbaiki dan melengkapi penulisan selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar setiap pembaca mengetahui urutan-urutan pembahasan didalam skripsi ini, maka berikut ini akan diuraikan sistematika dalam pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis jika ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi: gambaran umum subjek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Selanjutnya bab yang terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dan saran terkait dengan deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan.